



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
RATU GADING SEGARAPATI TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ratu Gading Segarapati Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten Kota dan Rencana Detil Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RATU GADING SEGARAPATI TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang sesuai dengan arahan atau perlu disusun RDTRnya atau yang ditetapkan di dalam RTRW yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Sub-Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
24. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Sub-Zona Taman Kota yang dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
26. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
27. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
28. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
29. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
30. Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA adalah daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

31. Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
32. Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
33. Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
34. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
35. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
36. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
37. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
38. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
39. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
40. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
41. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
42. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

43. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
44. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
45. Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
47. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
48. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
49. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
50. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
52. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
53. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

54. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
55. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase yang menunjukkan perbandingan antara luas tapak basement dengan perencanaan.
56. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
57. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
58. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
59. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
60. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Ratu Gading Segarapati ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.454,12 (tiga ribu empat ratus lima puluh empat koma satu dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Serut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelurahan Kebun Beler di Kecamatan Ratu Agung;
 - b. Kelurahan Kebun Kenanga di Kecamatan Ratu Agung;
 - c. Kelurahan Kebun Tebeng di Kecamatan Ratu Agung;
 - d. Kelurahan Lempuing di Kecamatan Ratu Agung;
 - e. Kelurahan Nusa Indah di Kecamatan Ratu Agung;
 - f. Kelurahan Sawah Lebar di Kecamatan Ratu Agung;
 - g. Kelurahan Sawah Lebar Baru di Kecamatan Ratu Agung;
 - h. Kelurahan Tanah Patah di Kecamatan Ratu Agung;
 - i. Kelurahan Anggut Atas di Kecamatan Ratu Samban;
 - j. Kelurahan Anggut Bawah di Kecamatan Ratu Samban;
 - k. Kelurahan Anggut Dalam di Kecamatan Ratu Samban;
 - l. Kelurahan Belakang Pondok di Kecamatan Ratu Samban;
 - m. Kelurahan Kebun Dahri di Kecamatan Ratu Samban;
 - n. Kelurahan Kebun Geran di Kecamatan Ratu Samban;
 - o. Kelurahan Padang Jati di Kecamatan Ratu Samban;
 - p. Kelurahan Pengantungan di Kecamatan Ratu Samban;
 - q. Kelurahan Penurunan di Kecamatan Ratu Samban;
 - r. Kelurahan Cempaka Permai di Kecamatan Gading Cempaka;
 - s. Kelurahan Jalan Gedang di Kecamatan Gading Cempaka;

- t. Kelurahan Lingkar Barat di Kecamatan Gading Cempaka;
 - u. Kelurahan Padang Harapan di Kecamatan Gading Cempaka;
 - v. Kelurahan Sidomulyo di Kecamatan Gading Cempaka;
 - w. Kelurahan Bajak di Kecamatan Teluk Segara;
 - x. Kelurahan Berkas di Kecamatan Teluk Segara;
 - y. Kelurahan Jitra di Kecamatan Teluk Segara;
 - z. Kelurahan Kampung Bali di Kecamatan Teluk Segara;
 - aa. Kelurahan Kebun Keling di Kecamatan Teluk Segara;
 - bb. Kelurahan Kebun Roos di Kecamatan Teluk Segara;
 - cc. Kelurahan Malabero di Kecamatan Teluk Segara;
 - dd. Kelurahan Pasar Baru di Kecamatan Teluk Segara;
 - ee. Kelurahan Pasar Melintang di Kecamatan Teluk Segara;
 - ff. Kelurahan Pintu Batu di Kecamatan Teluk Segara;
 - gg. Kelurahan Pondok Besi di Kecamatan Teluk Segara;
 - hh. Kelurahan Sumur Meleleh di Kecamatan Teluk Segara;
 - ii. Kelurahan Tengah Padang di Kecamatan Teluk Segara;
 - jj. Kelurahan Dusun Besar di Kecamatan Singaran Pati;
 - kk. Kelurahan Jembatan Kecil di Kecamatan Singaran Pati;
 - ll. Kelurahan Lingkar Timur di Kecamatan Singaran Pati;
 - mm. Kelurahan Padang Nangka di Kecamatan Singaran Pati;
 - nn. Kelurahan Panorama di Kecamatan Singaran Pati; dan
 - oo. Kelurahan Timur Indah di Kecamatan Singaran Pati.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri atas:
- a. SWP A seluas 263,80 (dua ratus enam puluh tiga koma delapan nol) hektare;
 - b. SWP B seluas 292,23 (dua ratus sembilan puluh dua koma dua tiga) hektare;
 - c. SWP C seluas 809,65 (delapan ratus sembilan koma enam lima) hektare;
 - d. SWP D seluas 1.167,79 (seribu seratus enam puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare; dan
 - e. SWP E seluas 920,65 (sembilan ratus dua puluh koma enam lima) hektare.

- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup seluruh Kelurahan Bajak, seluruh Kelurahan Berkas, seluruh Kelurahan Jitra, seluruh Kelurahan Kampung Bali, seluruh Kelurahan Kebun Keling, seluruh Kelurahan Kebun Roos, seluruh Kelurahan Malabero, seluruh Kelurahan Pasar Baru, seluruh Kelurahan Pasar Melintang, seluruh Kelurahan Pintu Batu, seluruh Kelurahan Pondok Besi, seluruh Kelurahan Sumur Meleleh, dan seluruh Kelurahan Tengah Padang terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 seluas 13,76 (tiga belas koma tujuh enam) hektare;
 - b. SWP I.A pada Blok I.A.2 seluas 11,12 (sebelas koma satu dua) hektare;
 - c. SWP I.A pada Blok I.A.3 seluas 34,55 (tiga puluh empat koma lima lima) hektare;
 - d. SWP I.A pada Blok I.A.4 seluas 20,59 (dua puluh koma lima Sembilan) hektare;
 - e. SWP I.A pada Blok I.A.5 seluas 13,50 (tiga belas koma lima nol) hektare;
 - f. SWP I.A pada Blok I.A.6 seluas 20,38 (dua puluh koma tiga delapan) hektare;
 - g. SWP I.A pada Blok I.A.7 seluas 11,55 (sebelas koma lima lima) hektare;
 - h. SWP I.A pada Blok I.A.8 seluas 13,42 (tiga belas koma empat dua) hektare;
 - i. SWP I.A pada Blok I.A.9 seluas 20,72 (dua puluh koma tujuh dua) hektare;
 - j. SWP I.A pada Blok I.A.10 seluas 16,79 (enam belas koma tujuh sembilan) hektare;
 - k. SWP I.A pada Blok I.A.11 seluas 15,06 (lima belas koma nol enam) hektare;
 - l. SWP I.A pada Blok I.A.12 seluas 33,18 (tiga puluh tiga koma satu delapan) hektare;
 - m. SWP I.A pada Blok I.A.13 seluas 24,79 (dua puluh empat koma tujuh sembilan) dan
 - n. SWP I.A pada Blok I.A.14 seluas 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup seluruh Kelurahan Anggut Atas, seluruh Kelurahan Anggut Bawah, seluruh Kelurahan Anggut Dalam, seluruh Kelurahan Belakang Pondok, seluruh Kelurahan Kebun Dahri, seluruh Kelurahan Kebun Geran, seluruh Kelurahan Padang Jati, seluruh Kelurahan Pengantungan, dan seluruh Kelurahan Penurunan terdiri atas:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.1 seluas 22,30 (dua puluh dua koma tiga nol) hektare;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 seluas 11,29 (sebelas koma dua sembilan) hektare;
 - c. SWP I.B pada Blok I.B.3 seluas 41,31 (empat puluh satu koma tiga satu) hektare;
 - d. SWP I.B pada Blok I.B.4 seluas 23,59 (dua puluh tiga koma lima sembilan) hektare;
 - e. SWP I.B pada Blok I.B.5 seluas 29,71 (dua puluh sembilan koma tujuh satu) hektare;
 - f. SWP I.B pada Blok I.B.6 seluas 16,84 (enam belas koma delapan empat) hektare;
 - g. SWP I.B pada Blok I.B.7 seluas 14,38 (empat belas koma tiga delapan) hektare;
 - h. SWP I.B pada Blok I.B.8 seluas 18,91 (delapan belas koma sembilan satu) hektare;
 - i. SWP I.B pada Blok I.B.9 seluas 22,09 (dua puluh dua koma nol sembilan) hektare;
 - j. SWP I.B pada Blok I.B.10 seluas 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektare;
 - k. SWP I.B pada Blok I.B.11 seluas 12,10 (dua belas koma satu nol) hektare;
 - l. SWP I.B pada Blok I.B.12 seluas 26,87 (dua puluh enam koma delapan tujuh) hektare;
 - m. SWP I.B pada Blok I.B.13 seluas 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) hektare; dan
 - n. SWP I.B pada Blok I.B.14 seluas 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektare.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup seluruh Kelurahan Kebun Beler, seluruh Kelurahan Kebun Kenanga, seluruh Kelurahan Kebun Tebeng, seluruh Kelurahan Lempuing, seluruh Kelurahan Nusa Indah, seluruh Kelurahan Sawah Lebar, seluruh Kelurahan Sawah Lebar Baru, dan seluruh Kelurahan Tanah Patah terdiri atas:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.1 seluas 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) hektare;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2 seluas 17,51 (tujuh belas koma lima satu) hektare;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3 seluas 42,56 (empat puluh dua koma lima enam) hektare;
 - d. SWP I.C pada Blok I.C.4 seluas 28,36 (dua puluh delapan koma tiga enam) hektare;
 - e. SWP I.C pada Blok I.C.5 seluas 15,23 (lima belas koma dua tiga) hektare;
 - f. SWP I.C pada Blok I.C.6 seluas 9,76 (sembilan koma tujuh enam) hektare;
 - g. SWP I.C pada Blok I.C.7 seluas 14,41 (empat belas koma empat satu) hektare;

- h. SWP I.C pada Blok I.C.8 seluas 16,48 (enam belas koma empat delapan) hektare;
 - i. SWP I.C pada Blok I.C.9 seluas 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) hektare;
 - j. SWP I.C pada Blok I.C.10 seluas 21,43 (dua puluh satu koma empat tiga) hektare;
 - k. SWP I.C pada Blok I.C.11 seluas 7,85 (tujuh koma delapan lima) hektare;
 - l. SWP I.C pada Blok I.C.12 seluas 12,93 (dua belas koma sembilan tiga) hektare;
 - m. SWP I.C pada Blok I.C.13 seluas 11,00 (sebelas koma nol nol) hektare;
 - n. SWP I.C pada Blok I.C.14 seluas 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektare;
 - o. SWP I.C pada Blok I.C.15 seluas 20,08 (dua puluh koma nol delapan) hektare;
 - p. SWP I.C pada Blok I.C.16 seluas 13,40 (tiga belas koma empat nol) hektare;
 - q. SWP I.C pada Blok I.C.17 seluas 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektare;
 - r. SWP I.C pada Blok I.C.18 seluas 21,32 (dua puluh satu koma tiga dua) hektare;
 - s. SWP I.C pada Blok I.C.19 seluas 45,43 (empat puluh lima koma empat tiga) hektare;
 - t. SWP I.C pada Blok I.C.20 seluas 56,91 (lima puluh enam koma sembilan satu) hektare;
 - u. SWP I.C pada Blok I.C.21 seluas 21,90 (dua puluh satu koma sembilan nol) hektare;
 - v. SWP I.C pada Blok I.C.22 seluas 21,75 (dua puluh satu koma tujuh lima) hektare;
 - w. SWP I.C pada Blok I.C.23 seluas 22,23 (dua puluh dua koma dua tiga) hektare;
 - x. SWP I.C pada Blok I.C.24 seluas 25,04 (dua puluh lima koma nol empat) hektare;
 - y. SWP I.C pada Blok I.C.25 seluas 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan nol) hektare;
 - z. SWP I.C pada Blok I.C.26 seluas 62,36 (enam puluh dua koma tiga enam) hektare;
 - aa. SWP I.C pada Blok I.C.27 seluas 64,60 (enam puluh empat koma enam nol) hektare; dan
 - bb. SWP I.C pada Blok I.C.28 seluas 137,71 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh satu) hektare.
- (8) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mencakup seluruh Kelurahan Cempaka Permai, seluruh Kelurahan Jalan Gedang, seluruh Kelurahan Lingkar Barat, seluruh Kelurahan Padang Harapan, dan seluruh Kelurahan Sidomulyo terdiri atas:

- a. SWP I.D pada Blok I.D.1 seluas 281,61 (dua ratus delapan puluh satu koma enam satu) hektare;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 seluas 46,99 (empat puluh enam koma sembilan sembilan) hektare;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3 seluas 25,40 (dua puluh lima koma empat nol) hektare;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.4 seluas 27,55 (dua puluh tujuh koma lima lima) hektare;
 - e. SWP I.D pada Blok I.D.5 seluas 34,13 (tiga puluh empat koma satu tiga) hektare;
 - f. SWP I.D pada Blok I.D.6 seluas 22,51 (dua puluh dua koma lima satu) hektare;
 - g. SWP I.D pada Blok I.D.7 seluas 47,59 (empat puluh tujuh koma lima sembilan) hektare;
 - h. SWP I.D pada Blok I.D.8 seluas 75,72 (tujuh puluh lima koma tujuh dua) hektare;
 - i. SWP I.D pada Blok I.D.9 seluas 30,01 (tiga puluh koma nol satu) hektare;
 - j. SWP I.D pada Blok I.D.10 seluas 46,63 (empat puluh enam koma enam tiga) hektare;
 - k. SWP I.D pada Blok I.D.11 seluas 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan nol) hektare;
 - l. SWP I.D pada Blok I.D.12 seluas 44,14 (empat puluh empat koma satu empat) hektare;
 - m. SWP I.D pada Blok I.D.13 seluas 49,18 (empat puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
 - n. SWP I.D pada Blok I.D.14 seluas 40,72 (empat puluh koma tujuh dua) hektare;
 - o. SWP I.D pada Blok I.D.15 seluas 34,86 (tiga puluh empat koma delapan enam) hektare;
 - p. SWP I.D pada Blok I.D.16 seluas 56,26 (lima puluh enam koma dua enam) hektare;
 - q. SWP I.D pada Blok I.D.17 seluas 48,51 (empat puluh delapan koma lima satu) hektare;
 - r. SWP I.D pada Blok I.D.18 seluas 51,72 (lima puluh satu koma tujuh dua) hektare;
 - s. SWP I.D pada Blok I.D.19 seluas 53,70 (tiga puluh tiga koma tujuh nol) hektare;; dan
 - t. SWP I.D pada Blok I.D.20 seluas 90,65 (sembilan puluh koma enam lima) hektare.
- (9) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e mencakup seluruh Kelurahan Dusun Besar, seluruh Kelurahan Jembatan Kecil, seluruh Kelurahan Lingkar Timur, seluruh Kelurahan Padang Nangka, seluruh Kelurahan Panorama, seluruh Kelurahan Timur Indah terdiri atas:

- a. SWP I.E pada Blok I.E.1 seluas 35,36 (tiga puluh lima koma tiga enam) hektare;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2 seluas 27,60 (dua puluh tujuh koma enam nol) hektare;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.3 seluas 29,42 (dua puluh sembilan koma empat dua) hektare;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.4 seluas 80,96 (delapan puluh koma sembilan enam) hektare;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.5 seluas 47,18 (empat puluh tujuh koma satu delapan) hektare;
 - f. SWP I.E pada Blok I.E.6 seluas 66,82 (enam puluh enam koma delapan dua) hektare;
 - g. SWP I.E pada Blok I.E.7 seluas 54,67 (lima puluh empat koma enam tujuh) hektare;
 - h. SWP I.E pada Blok I.E.8 seluas 36,83 (tiga puluh enam koma delapan tiga) hektare;
 - i. SWP I.E pada Blok I.E.9 seluas 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) hektare;
 - j. SWP I.E pada Blok I.E.10 seluas 164,65 (seratus enam puluh empat koma enam lima) hektare;
 - k. SWP I.E pada Blok I.E.11 seluas 60,00 (enam puluh koma nol nol) hektare; dan
 - l. SWP I.E pada Blok I.E.12 seluas 292,93 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan tiga) hektare.
- (10) Delineasi WP Ratu Gading Segarapati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Pembagian SWP dan Blok pada WP Ratu Gading Segarapati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Ratu Gading Segarapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Ratu Gading Segarapati Sebagai Pusat Pariwisata Sejarah dan Budaya dengan dukungan Perdagangan Jasa dan Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota//kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.26;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.10; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.3.

- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kecamatan terdapat di
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.10; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan; dan
 - e. halte;
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan Nakau – Air Sebakul (Bengkulu) melintas di SWP I.D.

- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jl. A. Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Bali melintas di SWP I.A;
 - c. Jl. Citandui melintas di SWP I.D;
 - d. Jl. Danau melintas di SWP I.E;
 - e. Jl. H. Adam Malik melintas di SWP I.D;
 - f. Jl. Hibrida melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - g. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - h. Jl. Jenggalu melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - i. Jl. Kapten P. Tendean melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - j. Jl. M. T. Haryono melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. Jl. Mayjend. Sutoyo melintas di SWP I.C dan SWP I.E;
 - l. Jl. MT. Haryono melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - m. Jl. P. Natadirja melintas di SWP I.D;
 - n. Jl. Pembangunan melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - o. Jl. S. Parman melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - p. Jl. Suprpto melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - q. jalan arteri sekunder lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.E.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jl. Abu Hanifah melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Asahan melintas di SWP I.D;
 - c. Jl. Batang Hari melintas di SWP I.C;
 - d. Jl. Bencoolen melintas di SWP I.A;
 - e. Jl. Ciliwung Raya melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - f. Jl. Kapuas Raya melintas di SWP I.D;
 - g. Jl. Kol Berlian melintas di SWP I.A;
 - h. Jl. Lempuing melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - i. Jl. Letkol Iskandar melintas di SWP I.A;
 - j. Jl. Moh. Hasan melintas di SWP I.A;
 - k. Jl. Nala melintas di SWP I.B;
 - l. Jl. Pariwisata melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D;
 - m. Jl. Pelabuhan Lama melintas di SWP I.A;
 - n. Jl. Prof. Dr. Hazairin melintas di SWP I.A;
 - o. Jl. Putri Gading Cempaka melintas di SWP I.B;

- p. Jl. Ratu Agung melintas di SWP I.B;
 - q. Jl. Sedap Malam melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - r. Jl. Serayu melintas di SWP I.D;
 - s. Jl. Soekarno Hatta melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - t. Jl. Sungai Rupert melintas di SWP I.D;
 - u. Jl. TP Kasim Nasir melintas di SWP I.A;
 - v. Jl. Bhakti Husada melintas di SWP I.D; dan
 - w. Pasir Putih – Kuala Baru melintas di SWP I.C.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jl. Arraw melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Bangka melintas di SWP I.B;
 - c. Jl. Barito melintas di SWP I.D;
 - d. Jl. Basuki Rahmat melintas di SWP I.B;
 - e. Jl. Belimbing melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - f. Jl. Benteng melintas di SWP I.A;
 - g. Jl. Bhayangkara melintas di SWP I.D;
 - h. Jl. Bukaka melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - i. Jl. Cempaka Raya melintas di SWP I.C;
 - j. Jl. Cendana melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - k. Jl. Cendrawasih melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - l. Jl. Ciliwung Raya melintas di SWP I.D;
 - m. Jl. Cimanuk melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - n. Jl. Cimanuk 2 melintas di SWP I.D;
 - o. Jl. Dempo Raya melintas di SWP I.C;
 - p. Jl. Enggano melintas di SWP I.A;
 - q. Jl. Fatmawati melintas di SWP I.B;
 - r. Jl. Ibnu Hajar melintas di SWP I.A;
 - s. Jl. Indra Cahya melintas di SWP I.A;
 - t. Jl. Indra Giri melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - u. Jl. Jati Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - v. Jl. K. Z. Abidin melintas di SWP I.B;
 - w. Jl. K. Z. Abidin II melintas di SWP I.B;
 - x. Jl. Karbela Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - y. Jl. Kb. Veteran melintas di SWP I.C;
 - z. Jl. Kedondong melintas di SWP I.E;
 - aa. Jl. Kenanga Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - bb. Jl. Kerapu melintas di SWP I.A;
 - cc. Jl. Letkol Iskandar melintas di SWP I.A;
 - dd. Jl. Letkol Sentosa melintas di SWP I.A;

- ee. Jl. Mahakam Raya melintas di SWP I.D;
 - ff. Jl. Mahoni melintas di SWP I.B;
 - gg. Jl. Mangga melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - hh. Jl. Manggis melintas di SWP I.E;
 - ii. Jl. Merapi Raya melintas di SWP I.C dan SWP I.E;
 - jj. Jl. Merawan Raya melintas di SWP I.C;
 - kk. Jl. Museum melintas di SWP I.C dan SWP I.E;
 - ll. Jl. Nuri Empat melintas di SWP I.B;
 - mm. Jl. Nusa Indah melintas di SWP I.C;
 - nn. Jl. Nusyirwan Zainul melintas di SWP I.A;
 - oo. Jl. Panjaitan melintas di SWP I.A;
 - pp. Jl. Pari melintas di SWP I.A;
 - qq. Jl. Plamboyan Raya melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - rr. Jl. Rafflesia melintas di SWP I.C;
 - ss. Jl. Rajamat melintas di SWP I.A;
 - tt. Jl. Sadang melintas di SWP I.D;
 - uu. Jl. Samping Alun-Alun melintas di SWP I.A;
 - vv. Jl. Serayu melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - ww. Jl. Seruni melintas di SWP I.C;
 - xx. Jl. Siti Khadijah melintas di SWP I.A;
 - yy. Jl. Sungai Kahayan melintas di SWP I.C;
 - zz. Jl. Timur Indah Raya melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - aaa. Jl. Todak melintas di SWP I.A;
 - bbb. Jl. Tribrata melintas di SWP I.D;
 - ccc. Jl. Veteran melintas di SWP I.A;
 - ddd. Jl. Zainul Arifin melintas di SWP I.E; dan
 - eee. NN 0072 melintas di SWP I.B.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jl. Beringin melintas di SWP I.B;
 - b. Jl. Rejamat 1 (Jalan BRI) melintas di SWP I.A;
 - c. Jl. Rokan Kiri melintas di SWP I.D; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

Paragraf 2

Jalan Tol

Pasal 9

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jalan tol Padang - Bengkulu melintas di SWP I.D.

- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.E pada Blok I.E.4.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, dan Blok I.E.12.

Paragraf 5

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.7 dan Blok I.B.8;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.22; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.11, dan Blok I.D.19.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Bukit Siguntang - Talang Ratu melintas di SWP I.C; dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Pulau Baai - PLTU Bengkulu melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.

- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa telepon *fixed line* melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.10, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.17, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.E; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.12.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit produksi berupa jaringan transmisi air minum terdapat di SWP I.C dan SWP I.D; dan
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja kelurahan sawah lebar baru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.16; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.6 dan Blok I.E.7.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.9, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, I.B.7, I.B.8 dan Blok I.B.13;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.20, Blok I.C.22, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.5 dan Blok I.E.7.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lapangan Merdeka di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. lapangan SMA Negeri 6 Kota Bengkulu di SWP I.A pada Blok I.A7;

- c. halaman gedung Masjid Agung At Taqwa di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - d. halaman gedung Rumah Sakit Raflesia Bengkulu di SWP I.B pada Blok I.B.7;
 - e. halaman Simpang Empat Kota Bengkulu di SWP I.C pada Blok I.C.26;
 - f. halaman gedung Balai Buntar di SWP I.D pada Blok I.D.10;
 - g. lapangan Jalan Ciliwung Raya di SWP I.D pada Blok I.D.17;
 - h. lapangan SMKN 2 Bengkulu di SWP I.D pada Blok I.D.19; dan
 - i. lapangan Sepak Bola Jalan Rinjani di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. halaman gedung SMP Negeri 1 Kota Bengkulu di SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - b. lapangan Stadion Semarak Bengkulu di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. halaman gedung Universitas Muhammadiyah Bengkulu Kampus 4 di SWP I.D pada Blok I.D.12; dan
 - d. lapangan BPBD Kota Bengkulu di SWP I.E pada Blok I.E.5.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- b. Zona konservasi dengan kode KS;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 172,31 (seratus tujuh puluh dua koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 112,28 (seratus dua belas koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.9; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.5 dan Blok I.E.12.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.14;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.25, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.14; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.5, dan Blok I.E.12.

- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,94 (empat belas koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.8, Blok I.D.13, dan Blok I.D.16; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.6, dan Blok I.E.9.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 12,75 (dua belas koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.15, Blok I.C.20, dan Blok I.C.25;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.8, Blok I.D.11, dan Blok I.D.20; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.8 dan Blok I.E.11.
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27 dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, dan Blok I.D.16; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.11.

Paragraf 2

Zona Konservasi

Pasal 24

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 541,24 (lima ratus empat puluh satu koma dua empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona cagar alam dengan kode CA; dan
 - b. Sub-Zona taman wisata alam dengan kode TWA.

- (2) Sub-Zona cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 322,44 (tiga ratus dua puluh dua koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.10 dan Blok I.E.12.
- (3) Sub-Zona taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 218,80 (dua ratus delapan belas koma delapan nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.28;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.17, dan Blok I.D.20; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.10 dan Blok I.E.12.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 6,87 (enam koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,87 (enam koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.15.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 26

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 11,75 (sebelas koma tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,75 (sebelas koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;

- d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, dan Blok I.E.10.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pariwisata dengan kode W;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- f. Zona perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- j. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 166,36 (seratus enam puluh enam koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 166,36 (seratus enam puluh enam koma tiga enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.12;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.10.

Paragraf 2

Zona Pariwisata

Pasal 29

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 77,04 (tujuh puluh tujuh koma nol empat) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 77,04 (tujuh puluh tujuh koma nol empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5 dan Blok I.A.14;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
- d. SWP I.E pada Blok I.E.10.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 1.560,44 (seribu lima ratus enam puluh koma empat empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 868,04 (delapan ratus enam puluh delapan koma nol empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.19; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 565,20 (lima ratus enam puluh lima koma dua nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 127,21 (seratus dua puluh tujuh koma dua satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.12, dan Blok I.C.13
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 150,63 (seratus lima puluh koma enam tiga) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 69,59 (enam puluh sembilan koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.13;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.20, dan Blok I.C.22;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.6.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 55,94 (lima puluh lima koma sembilan empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.7;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.16, dan Blok I.D.19; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.

Paragraf 5

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 394,21 (tiga ratus sembilan puluh empat koma dua satu) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,91 (dua puluh koma sembilan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.14; dan

- c. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 223,59 (dua ratus dua puluh tiga koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.13; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 149,70 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh nol) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11.

Paragraf 6

Zona Perkantoran

Pasal 33

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 121,06 (seratus dua puluh satu koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 121,06 (seratus dua puluh satu koma nol enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 - SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11.

Paragraf 7

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

- Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di:
 - SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 - SWP I.E pada Blok I.E.5 dan Blok I.E.7.

Paragraf 8

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 21,44 (dua puluh satu koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 21,44 (dua puluh satu koma empat empat) hektare terdapat di:
 - Kepolisian Resor Kota Bengkulu yang terdapat di SWP I.A pada Blok A.I.4;
 - Koramil 0407-05/Ratu Agung terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.20;
 - Kepolisian Daerah Bengkulu terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8;

- d. Detasemen Polisi Militer II/1 terdapat di SWP SWP I.D pada Blok I.D.8;
- e. Kodim 0407 yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.9;
- f. Korem 041/Gamas yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.19; dan
- g. Batalyon Infantri 144/Jaya Yudha Kompi Senapan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.11.

Paragraf 9

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 4,28 (empat koma dua delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,34 (satu koma tiga empat) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8.

Paragraf 10

Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 226,39 (dua ratus dua puluh enam koma tiga sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 226,39 (dua ratus dua puluh enam koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;

- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Ratu Gading Segarapati.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Ratu Gading Segarapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi T1 diperbolehkan Secara Terbatas Dengan Waktu Operasional Maksimal Jam 22.00 WIB;
 - b. Klasifikasi T2 diperbolehkan Secara Terbatas Berdasarkan Intensitas Pemanfaatan Ruang Yaitu Maksimal 20% Dari Luas Total Sub-Zona; dan
 - c. Klasifikasi T3 diperbolehkan Secara Terbatas Dengan Pembatasan Skala Pelayanan Untuk Skala Blok Dan/Atau Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi yang membidangi dan/atau FPR;
 - b. Klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki persetujuan warga; dan
 - c. Klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari menteri/instansi yang membidangi pertanian.

- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - b. Zona konservasi dengan kode KS meliputi:
 - 1. Sub-Zona cagar alam dengan kode CA; dan
 - 2. Sub-Zona taman wisata alam dengan kode TWA.
 - c. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - d. Zona Badan Air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - j. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. koefisien tapak basement (KTB) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

- b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP);
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana;
- e. kawasan sempadan; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan (hankam).

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kota terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.9; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.5.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.19 dan Blok I.C.25;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.14; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.5.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.12;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.16; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.9.
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.13;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.15, Blok I.C.20, dan Blok I.C.25; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.11.
 - e. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.9;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.14;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.26 dan Blok I.C.27; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.11.
 - f. Sub-Zona cagar budaya terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.15.
- g. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.26 dan Blok I.C.27.
- h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.19; dan
 5. Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.7.
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan

2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- l. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.20, dan Blok I.C.22; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19.
- m. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.7;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.16, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- n. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.26, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5, dan Blok I.E.7
- o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.14; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok

- I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
3. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.27;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8.
- q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.7, Blok I.E.8, dan Blok I.E.9.
- r. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.5.
- s. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di
1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.5.
- t. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;

2. SWP I.C pada Blok I.C.20 dan Blok I.C.27; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.9 dan Blok I.D.19.
- u. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - v. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.13;
 - b. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8;
 - c. Sub-Zona jalur hijau terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.12, dan Blok I.D.13;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15;
 - f. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.12, dan Blok I.D.15;
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.13;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.13;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.12, dan Blok I.D.13;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15;
 - k. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.13; dan
 - l. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8.
- (4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.14;
 - b. Sub-Zona jalur hijau terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.14;
 - c. Sub-Zona taman wisata alam terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.14, Blok I.D.15, dan Blok I.D.20;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7;

- e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.14, dan Blok I.D.15;
 - f. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8;
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.14.
- (5) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kota terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.12.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.12;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.16; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.6.
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.10;
 - e. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.16; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.11.
 - f. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - g. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.28;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.7; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.28;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.20; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.11 dan Blok I.E.12.
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.11 dan Blok I.E.12.

- k. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.15; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.6.
 - l. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.16; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.11.
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.5; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.6, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.28;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.7.
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.5; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11.
 - p. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11; dan
 - q. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.11.
- (6) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kota terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.12.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.28;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.12.
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.8 dan Blok I.E.11.
 - d. Sub-Zona jalur hijau terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28;
 - e. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.12; dan

2. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - f. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.14; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.7;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.18; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.12, dan Blok I.C.13; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - j. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.28; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.7 dan Blok I.E.10.
 - k. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.28; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.7, Blok I.E.8, dan Blok I.E.10.
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8.
 - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11.
 - n. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.28; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.11.
 - o. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.7; dan
 - p. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.11.
- (7) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perencanaan bangunan gedung yang memiliki ketinggian diatas 4 (empat) lantai wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang;

- b. perencanaan bangunan gedung tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - c. perencanaan bangunan gedung tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang, tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, tidak menimbulkan asap, dan kegiatan lain yang dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - d. ketentuan lainnya terkait pengembangan dan pembangunan bangunan gedung di sekitar KKOP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b bertampalan dengan Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.12;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.10.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bangunan perumahan yang terdapat di dalam ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperkenankan melakukan pertambahan atau perluasan bangunan penunjang hunian;
 - b. hamparan yang belum terdapat bangunan dan/atau dijadikan lahan terbangun tetap dijadikan Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan syarat:

1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan.
- e. pengaturan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - b. Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - c. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - d. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - e. Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.12;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.12;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.7.
- d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.26, Blok I.C.27, Blok I.C.28;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, Blok I.D.20; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.12, dan Blok I.C.13;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan d Blok I.E.12.
- f. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.20, dan Blok I.C.22;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.10, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.6.
- g. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.7;

3. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.15, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.16, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.10, dan Blok I.E.11.
- h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.15, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, dan Blok I.C.26;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.
- i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.12;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, dan Blok I.D.13; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8.
- k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10;

3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.11.
- l. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.15, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.13, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, dan Blok I.E.11.
 - m. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.5 dan Blok I.E.7;
 - n. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - o. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8;
 - p. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.20 dan Blok I.C.27;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.19; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.11.
 - q. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok

- I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.15, Blok I.C.16, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.21, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, Blok I.E.11, dan Blok I.E.12.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap bangunan yang ada pada kawasan rawan bencana harus menerapkan konsep perencanaan bangunan yang tahan terhadap gempa, gerakan tanah, dan adaptif terhadap kondisi lingkungannya;
 - b. perencanaan bangunan harus mengacu pada sistem struktur - konstruksi bangunan harus mengacu pada standar dan pedoman bangunan tahan gempa dan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menggunakan material yang memenuhi standar teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. perencanaan bangunan gedung yang memiliki ketinggian diatas 4 (empat) lantai wajib untuk mendapatkan rekomendasi serta sertifikat uji kelayakan bangunan dan ketahanan terhadap gempa dan gerakan tanah dari pihak berwenang;
 - d. perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - e. setiap bangunan gedung yang menggumpukan masa yang banyak wajib menyediakan titik kumpul untuk menjadi tempat evakuasi sementara;
 - f. menambahkan prasarana sarana minimum untuk kawasan rawan bencana serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan lainnya terkait pengembangan dan pembangunan bangunan gedung di kawasan rawan bencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:

- a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.18 dan Blok I.D.20.
 - c. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13.
 - d. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.28.
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.28.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.14.
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
 - h. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.28; dan
 - i. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.18 dan Blok I.D.20.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - b. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - c. pembangunan sistem peringatan dini tsunami;
 - d. sosialisasi mengenai karakteristik, tanda-tanda tsunami, cara penyelamatan, dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi tsunami;

- e. menambahkan prasarana sarana minimum untuk kawasan rawan bencana serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan lainnya terkait mitigasi di kawasan rawan bencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.14;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - e. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.13.
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.14.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
 - k. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.14; dan
 - l. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14;

2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.18 dan Blok I.D.20.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - b. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - c. sosialisasi mengenai karakteristik, tanda-tanda, cara penyelamatan, dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi gelombang ekstrem;
 - d. menambahkan prasarana sarana minimum untuk kawasan rawan bencana serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait mitigasi di kawasan rawan bencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.12;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.14;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.10.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.14;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.7, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.9 dan Blok I.D.19; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12,

- Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
2. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.12, dan Blok I.C.13;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.10 dan Blok I.E.12.
- f. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.20; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.19.
- g. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.19, dan Blok I.C.28;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.19; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.10.
- h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.19, dan Blok I.C.28.
- i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.14.
- j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.14;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.25, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, dan Blok I.D.13; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.
- k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.13 dan Blok I.D.14.
- l. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.28;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.19; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- m. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;

- n. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.27; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.19.
 - o. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.14;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.12.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala;
 - b. perencanaan jaringan drainase pada perumahan dan kawasan permukiman serta pemeliharaan dan perawatan secara berkala;
 - c. sosialisasi penyebab, mitigasi, dan tindakan evakuasi rawan bencana;
 - d. menambahkan prasarana sarana minimum untuk kawasan rawan bencana serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait mitigasi di kawasan rawan bencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, dan Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.19.
- c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20.
- d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- e. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.8, dan Blok I.B.13;
- f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.25 dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.19.
- g. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.24 dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.18.
- h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.14.
- i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.13, Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28.
- j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.10; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27.
 - k. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.8, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.22, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.19.
 - l. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 - m. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.22, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap bangunan yang ada pada kawasan rawan bencana harus menerapkan konsep perencanaan bangunan yang tahan terhadap gempa, gerakan tanah, dan adaptif terhadap kondisi lingkungannya;
 - b. perencanaan bangunan harus mengacu pada sistem struktur - konstruksi bangunan harus mengacu pada standar dan pedoman bangunan tahan gempa dan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menggunakan material yang memenuhi standar teknis keamanan dan keselamatan;
 - c. perencanaan bangunan gedung yang memiliki ketinggian diatas 4 (empat) lantai wajib untuk

- mendapatkan rekomendasi serta sertifikat uji kelayakan bangunan dan ketahanan terhadap gempa dan gerakan tanah dari pihak berwenang;
- d. setiap bangunan gedung yang menggumpukan masa yang banyak wajib menyediakan titik kumpul untuk menjadi tempat evakuasi sementara;
 - e. menambahkan prasarana sarana minimum untuk kawasan rawan bencana serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan lainnya terkait pengembangan dan pembangunan bangunan gedung di kawasan rawan bencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.17;
 - d. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4 dan Blok I.B.7;
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.26; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.19.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.26; dan
 - g. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.10.

- (3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.8;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.12.
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.11; dan
 - c. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.5.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana untuk penyediaan sarana tempat evakuasi bencana yang merupakan bangunan dan fasilitas publik sesuai dengan standar dan pedoman mitigasi bencana;
 - b. penyusunan rencana dan ketentuan teknis penyediaan sarana prasarana evakuasi bencana mengikuti standar dan pedoman yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang di daerah; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana evakuasi bencana sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.14; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5.
 - b. Sub-Zona taman RW terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.14;
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;

- d. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.27.
- e. Sub-Zona taman wisata alam terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.28.
- f. Sub-Zona cagar budaya terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
- g. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.14, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.14;
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
- k. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- l. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- m. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.14.
- o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.14;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
- q. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.14;
- r. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
- s. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, dan Blok I.A.14;

2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.27 dan Blok I.C.28.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan khusus pada kawasan sempadan adalah sempadan pantai;
 - b. ketentuan mengenai lebar sempadan pantai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama pesisir agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penimbunan seperti reklamasi pada kawasan sempadan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.19 dan Blok I.C.28; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.12 dan Blok I.A.7;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.6 dan Blok I.E.9.
 - c. Sub-Zona taman RW terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.11 dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.11; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.24.
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.13; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6.
 - e. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.14;

3. SWP I.C pada Blok I.C.27; dan
4. SWP I.D pada Blok I.D.8.
- f. Sub-Zona cagar alam terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.12.
- g. Sub-Zona taman wisata alam terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.28;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.14, Blok I.D.17, dan Blok I.D.20; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.12.
- h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.5; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.10.
- i. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.13; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28.
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.22, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, dan Blok I.C.26;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, dan Blok I.E.7.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.13, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, dan Blok I.D.19; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.8, Blok I.E.9, dan Blok I.E.10.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- m. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.13;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.20; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.19.
- n. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.11;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.7;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.10, Blok I.C.11, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.8; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.4, Blok I.E.6, dan Blok I.E.10.
- o. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.23.
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4;
- q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.11 dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.6, Blok I.D.8, Blok I.D.9, dan Blok I.D.13; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.7, dan Blok I.E.8.
- r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.11, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.23, Blok I.C.25, Blok I.C.26, dan Blok I.C.27;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, dan Blok I.D.13; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.6.
- s. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.6 dan Blok I.B.8;

2. SWP I.D pada Blok I.D.10, dan Blok I.D.19; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- t. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8 dan Blok I.D.9; dan
- u. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.17, Blok I.C.18, Blok I.C.19, Blok I.C.20, Blok I.C.23, Blok I.C.24, Blok I.C.25, Blok I.C.26, Blok I.C.27, dan Blok I.C.28;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, Blok I.D.18, Blok I.D.19, dan Blok I.D.20; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6, Blok I.E.7, Blok I.E.8, Blok I.E.9, Blok I.E.10, dan Blok I.E.12.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan 25 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya, menjaga kelestarian fungsi sungai, dan pembatasan daya rusak air sungai terhadap lingkungannya;
 - b. pada lokasi dengan kerentanan abrasi tinggi tidak diperbolehkan ada kegiatan budidaya;
 - c. ketentuan bangunan kegiatan budi daya menggunakan material yang memenuhi standar teknis keamanan dan keselamatan;
 - d. kegiatan pertanian tanaman pangan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat di sempadan sungai diperkenankan dan merupakan bagian dari ketentuan khusus sempadan;
 - e. semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;

- f. Kegiatan penimbunan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
 - g. ketentuan mengenai lebar sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - e. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan pelarangan sebagai berikut:
 - 1. menanam tanaman yang masuk ke ruang bebas, membangun bangunan yang masuk ke ruang bebas, bangunan pada tanah tapak menara atau tiang, dan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak atau terbakar;
 - 2. melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari lima puluh meter dari konduktor terluar jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 3. mengambil, mengganggu, merusak dan atau membongkar bagian dari pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
 - 4. memanjat penyangga, menembak, melempar, menyolok, dan menyentuh konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
 - 5. kegiatan yang berpotensi mengganggu jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 6. membakar benda apapun secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas;
 - 7. menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan

- jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah; dan
8. menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara atau tiang.
 - b. ketentuan arahan berupa pengembangan kegiatan budi daya di sekitar kawasan sempadan ketenagalistrikan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan (hankam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f bertampalan dengan:
 - a. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.11 dan Blok I.E.12 ; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.11 dan Blok I.E.12.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan (hankam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kegiatan budi daya dilakukan secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. Diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan di luar fungsi pertahanan dan keamanan namun tidak mengganggu kegiatan fungsi militer yang ada di sekitarnya;
 - c. Diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan di luar fungsi pertahanan dan keamanan namun tidak menyebabkan dampak ancaman atau intervensi terhadap kegiatan fungsi militer yang ada di sekitarnya; dan
 - d. Ketentuan teknis ruang dan bangunan mengikuti standar dan pedoman bangunan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan (hankam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RDTR WP Ratu Gading Segarapati adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR WP Ratu Gading Segarapati terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR WP Ratu Gading Segarapati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota tentang RDTR WP Ratu Gading Segarapati dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Ratu Gading Segarapati yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan

- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 57

Dalam Kondisi Kontijensi/darurat, beberapa kawasan dapat digunakan untuk :

- a. Kawasan Pertanian digunakan untuk logistik pertahanan;
- b. Kawasan Permukiman gedung bertingkat yang memiliki *basement* digunakan untuk mendukung pertahanan; dan
- c. Kawasan hutan digunakan untuk daerah pertempuran
- d. Kawasan industri digunakan untuk mendukung pertahanan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal **10 April 2025**

WALI KOTA BENGKULU,



DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal **10 April 2025**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,



ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR **1.**